

PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH

TEGAL CITY EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT PROGRAM TO OVERCOME THE DROPOUT RATE

Oleh: Ittasaqa Badasyari, Universitas Negeri Yogyakarta

Ittasaqabadasyari.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal (Disdikbud Kota Tegal) dalam mengatasi angka putus sekolah beserta perannya dalam mengupayakan keberhasilan program. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek berjumlah delapan orang dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis menggunakan model interaktif Miles Hubberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil Penelitian menunjukkan, program yang ditetapkan dalam mengatasi angka putus sekolah antara lain Program ASELA DIJAKETI yang terdiri dari kegiatan Si Abang Belajar dan SKB Inklusi, selanjutnya yaitu Program Taruni PAUD (Pendaftaran Anak Usia Dini). Peran Disdikbud Kota Tegal sebagai pelaksana program yaitu, memiliki peran instruktif berupa perintah dan koordinasi sebagai aktor utama, serta memiliki kuasa dalam upaya mensukseskan program salah satunya dengan bekerja sama dan bebas dalam menentukan *partnernya*.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, program pendidikan, angka putus sekolah

Abstract

This research aims to describe program of Education and Culture Department Tegal to overcome the dropout rate, role of Department, and the effort to strive the successful of the program. This research method uses a descriptive qualitative approach. Participate the research based on the purposive sampling, there are 8 peoples who were. Data is collected by interview and documentation and analyzed using Miles and Hubberman's interactive model consisting data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal. Data validity test using triangulation sources and techniques. The results show that programs that made by Education and Culture Department Tegal to overcome the dropout rate, and then ASELA DIJAKETI that contains two program is Si Abang Belajar and SKB Inklusi, next is Taruni PAUD programs (The early Childhood Education). The role of the Department as program implementor is instructive role who existence of orders and coordination that the Department is not only the main actor in the program but also has the power to do something as an effort to make the program successful by working together and have a freedom to determine its partner.

Keywords: Education and Culture Office, program of education, dropout rate

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Kesadaran mengenai pendidikan akan mempengaruhi kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Sejalan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan UUD 1945 ayat 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat pula Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar khususnya pada pasal 7 ayat 4 dan 5 mewajibkan warga untuk wajib belajar 12 tahun. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak sebagai warga negara tanpa terkecuali. Namun, realita pendidikan di Indonesia masih belum merata sampai ke seluruh penjuru negeri dan berpusat pada daerah-daerah tertentu terutama di pulau Jawa.

Angka putus sekolah masih menjadi permasalahan yang besar di Indonesia. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan data angka anak putus sekolah di Indonesia pada tahun 2019 sekitar 4,3 juta siswa diberbagai jenjang.

Fenomena putus sekolah juga terjadi di Kota Tegal yang merupakan daerah berada di utara Jawa Tengah. Menurut data BPS

Kota Tegal tahun 2017 mengungkapkan angka putus sekolah pada jenjang SD terdapat 15,83%, jenjang SMP sejumlah 10,55%, dan jenjang SMA terdapat 61,16%. Adapun pernyataan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mengungkapkan terdapat 573 anak tidak sekolah atau putus sekolah di tahun 2018.

Putus sekolah merupakan kondisi peserta didik yang belum menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mengungkapkan terdapat faktor anak putus sekolah di Kota Tegal, diantaranya sudah bekerja, menikah, dan pindah ke luar kota.

Menyikapi masalah pendidikan, pemerintahan kabupaten/kota di era desentralisasi pendidikan memiliki kewenangan tersendiri. Desentralisasi pendidikan berarti adanya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan pendidikan (Abdul Halim, 2001:15).

Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dapat membuat kebijakan dan program dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Mereka juga mampu mendorong proses otonomi baik pada pemerintah pusat maupun disetiap satuan pendidikan agar dapat mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil, dan merata bagi setiap masyarakat.

Hasil penelitian dari Benjamin Morin, dkk (2017) mengenai masih tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung menjadi suatu indikator masih lemahnya kinerja Dinas Pendidikan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Arief Tri Atmoko (2014) menunjukkan kebijakan pemerintah dalam pengentasan siswa putus sekolah di Kabupaten Batang yaitu adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Beasiswa untuk Keluarga Kurang Mampu (BKMM), Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu tapi Berprestasi (BKMTB). Hal tersebut menggambarkan strategi yang dilakukan oleh para pemerintah dalam mengatasi angka putus sekolah di setiap wilayahnya, dalam hal ini penulis ingin mengetahui program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam mengatasi angka putus sekolah.

Selaku pemangku kebijakan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal memiliki wewenang dalam membuat, menjalankan, serta memantau pelaksanaan pendidikan. Sehingga, berdasarkan permasalahan angka putus sekolah di Kota Tegal, Disdikbud Kota Tegal mengeluarkan program pendidikan. Program tersebut diantaranya program ASELA DIJAKETI, diresmikan pada tahun 2021 dan program Taruni PAUD diresmikan pada tahun 2020. Program tersebut dikatakan masih baru dan kegiatannya sudah berjalan selama satu semester sehingga dibutuhkan kajian untuk melihat sejauh mana program tersebut dapat berhasil.

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih dalam program pengentasan angka putus sekolah di Kota Tegal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta melihat peran mereka sebagai pemangku kebijakan dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi pendidikan yang adil dan merata.

Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga, akademisi, dan unsur masyarakat lain yang hendak mencermati program-program pengentasan angka putus sekolah khususnya di Kota Tegal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan program yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam mengentaskan angka putus sekolah serta peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam pelaksana program tersebut.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal pada Bulan Januari hingga Maret 2022.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* karena dianggap paling mengerti akan permasalahan yang dibahas peneliti. Pada penelitian ini subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Tegal, Ketua bidang PPTK, Ketua bidang P2PNF, Kasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu P2PNF, Koordinator dan Tutor Si Abang Belajar Kelurahan Margadana, Koordinator dan Tutor SKB Inklusi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran utama dalam menentukan fokus, sumber penelitian, pengumpulan data, penafsiran, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam catatan lapangan.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis dari Miles dan Huberman (2014) antara lain reduksi data yang dilakukan dengan alat berupa catatan lapangan dan kondensasi data. Selanjutnya penyajian data dilakukan dengan menguraikan yang bersifat naratif. Setelah itu penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mencari pola, tema, bentuk, kausalitas, persamaan, dan komparasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber wawancara dan triangulasi teknik dilakukan melalui studi dokumentasi yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan sepanjang bulan Januari hingga Maret 2022 terhadap delapan informan

sebagai sumber informasi mengenai program-program pengentasan angka putus sekolah. Deskripsi hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi landasan, pengorganisasian dan hasil pelaksanaan program. Selain itu, mengidentifikasi peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sebagai pelaksana program pengentasan angka putus sekolah.

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam mengatasi Angka Putus Sekolah

Anak putus sekolah di Kota Tegal berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan tahun 2018 yaitu terdapat 573 anak dari berbagai jenjang. Sejalan dari itu, dibutuhkannya landasan kebijakan sebagai pedoman masalah. Selanjutnya dibutuhkan pengorganisasian disetiap program serta melihat hasil pelaksanaan di lapangan untuk dapat di evaluasi kedepannya. Berikut pembahasan lebih lanjut

1. Landasan Kebijakan Program Pengentasan Angka Putus Sekolah

Landasan kebijakan merupakan pedoman dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuan tertentu. Disisi lain, landasan kebijakan dibutuhkan untuk memberi informasi kepada pembuat kebijakan yang digunakan untuk

memecahkan masalah-masalah masyarakat. Landasan kebijakan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut hasil wawancara, landasan yang digunakan dalam program pengentasan angka putus sekolah di Kota Tegal merujuk pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 12 tahun dan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Program-program yang dijalankan oleh Disdikbud Kota Tegal sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut dan diharapkan dapat mengentaskan angka putus sekolah di Kota Tegal.

Hasil riset oleh Arief Tri Atmoko (2014) menunjukkan bahwa landasan yang digunakan pemerintah Batang dalam menetapkan program yaitu sesuai dengan amanat UUD 1945 alenia keempat yaitu segenap rakyat Indonesia memiliki hak mendapatkan pendidikan yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan bangsa. Selain itu terdapat UUD 1945 pasal 31 ayat satu sampai lima yang merupakan kewajiban suatu lembaga menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Landasan dalam penetapan program pengentasan angka putus sekolah baik Pemerintah Batang dan Pemerintah Kota Tegal mengarah pada UUD 1945. Landasan yang digunakan tersebut menjadi alasan utama bagi semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.

2. Program yang ditetapkan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal telah melakukan analisis terhadap permasalahan pendidikan yaitu adanya putus sekolah. Terdapat program yang dapat dikembangkan dan dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Berikut program yang diluncurkan Dinas dalam pengentasan angka putus sekolah di Kota Tegal.

Tabel 1. Program Pengentasan Angka Putus Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Program	Deskripsi Kegiatan
ASELA DIJAKETI (Ayo Sekolah Lagi Terintegrasi dengan Pendidikan Kejar Paket dan SKB Inklusi). Tujuan: • Mengentaskan dan memotivasi agar kembali bersekolah. • Melayani ABK sesuai kebutuhannya. • Menurunkan APS • Meningkatkan RLS	Si Abang Belajar (Sanggar Kegiatan Belajar): mengajak anak putus sekolah, dan tidak sekolah untuk bersekolah kembali. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 Kelurahan. SKB Inklusi: pembelajaran yang berisikan anak berkebutuhan khusus dan anak normal dalam satu lingkungan.

Program	Deskripsi Kegiatan
Taruni PAUD (Pendaftaran Anak Usia Dini) Tujuan: Anak memiliki bekal ilmu dari PAUD dalam memanfaatkan anak mau usia emas mereka sebelum masuk ke jenjang SD.	Sosialisasi kepada orang tua agar memasukkan anaknya (usia 5-6 tahun) ke PAUD. Sehingga, setelah umur 7 tahun anak mau melanjutkan ke jenjang SD. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan anak putus sekolah di jenjang SD.

Hasil riset dari Morin Benjamin, dkk (2017) menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bitung menetapkan beberapa program baik mengarah pada pemberian dana maupun dengan sosialisasi. Program tersebut antara lain program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), dan Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah).

Program pengentasan angka putus sekolah yang ditetapkan dari Dinas Pendidikan Kota Bitung lebih mengarah kepada pemberian dana kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal menetapkan program yang mana siswa tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian terdapat kesamaan yaitu terdapat program sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bersekolah kembali.

3. Pengorganisasian Program

Pengorganisasian program merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab diantara pelaksana program agar berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan yang dikehendaki. Apabila pengorganisasian dilakukan dengan maksimal, maka program akan berjalan dengan baik.

Pengorganisasian suatu program tidak terlepas dari kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Adapun pengorganisasian program-program pengentasan angka putus sekolah di Kota Tegal dijabarkan sebagai berikut.

a. ASELA DIJAKETI

Program ASELA DIJAKETI memiliki dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu Si Abang Belajar, ditunjang oleh beberapa SDM. SDM yang pertama yaitu pemateri belajar. Pemateri belajar adalah guru dari masing-masing sekolah yang bertugas membuat materi pembelajaran sekaligus mengajar. Kedua yaitu pendamping pembelajaran yang bertugas mendampingi anak-anak belajar dengan melakukan akses internet lokal di lokasi kegiatan. Pendamping belajar berasal dari unsur akademisi yang ada di Tegal maupun luar Tegal. Terakhir yaitu koordinator lapangan, bertugas melakukan supervisi dan monitoring terhadap keberlangsungan kegiatan sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Terdapat pula serta fasilitas yang menunjang seperti wifi, laptop, alat tulis kelas yang mana fasilitas tersebut bersumber dari dana APBD Kota Tegal.

Kegiatan kedua yaitu SKB Inklusi. SDM yang terlibat antara lain tenaga pendidik atau tutor, teraphys (melakukan analisis kepada ABK apabila dibutuhkan pengobatan), ahli gizi (memberikan diagnosis gizi dan nutrisi pada makanan yang akan diberikan kepada ABK), dan dokter kesehatan (menangani gejala dan penyakit pada ABK).

Pelayanan khusus pada SKB Inklusi diberikan oleh pemerintah langsung sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat agar mendapatkan haknya dalam pendidikan. Fasilitas yang didapatkan oleh siswa SKB Inklusi antara lain makanan, seragam, transportasi. Pemenuhan fasilitas tersebut bersumber dari APBD Kota Tegal.

Pengorganisasian Si Abang Belajar dan SKB Inklusi menunjukkan kerja sama yang baik antar SDM yang terlibat. Pemanfaatan fasilitas dan biaya juga digunakan dengan baik oleh para pelaksana maupun siswa.

b. Taruni PAUD

Peraturan Walikota Tegal Nomor 46 Tahun 2020 pasal 7 merupakan landasan penyelenggaraan Taruni PAUD terkait pihak-pihak yang terlibat dalam program. Dalam hal ini, terdapat peran dari Bunda PAUD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1/069.1 Tahun 2021, terdapat Tim Bunda PAUD antara lain Tim Teknis, Tim Sosialisasi dan Tim Administrasi. Namun, tim Bunda PAUD belum berjalan dikarenakan adanya pandemi dan pembagian tugas yang belum jelas.

Hasil penelitian dari Evi Lestari (2017) menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam implementasi mutu pendidikan di SD Inpres Bangkala II Kota Makassar yaitu kategori rendah. Terdapat pembagian tugas yang tidak jelas serta pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengorganisasian program pengentasan angka putus sekolah di Kota Tegal pada program ASELA DIJAKETI menunjukkan kerjasama yang baik antar pelaksana. Namun, dibandingkan dengan hasil pengorganisasian pada SD Inpres Bangkala II Kota Makassar, program Taruni

PAUD di Kota Tegal juga masih belum jelas pembagian tugas untuk para pelaksana.

4. Hasil Pelaksanaan Program

a. Hasil Program ASELA DIJAKETI

1) Si Abang Belajar

Si Abang Belajar di Kelurahan Margadana merupakan kegiatan yang paling banyak pesertanya dibanding kelurahan lain. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sudah berjalan selama satu semester. Kegiatan dilaksanakan tiga kali dalam seminggu antara lain hari senin, selasa, dan rabu pada waktu setelah maghrib.

Kegiatan Si Abang Belajar menghasilkan manfaat yaitu motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Antusias siswa dalam belajar membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Hal tersebut ditunjang oleh kegiatan selingan yang diberikan tutor yaitu tontonan berupa film edukasi yang diputar setiap rabu malam. Siswa tidak dipungut biaya sama sekali, melainkan mendapat uang transport dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Fasilitas pembelajaran seperti wifi dan laptop juga digunakan secara efektif oleh siswa yang didampingi oleh tutor.

Faktor pendukung kegiatan yaitu antusias belajar siswa yang tinggi karena didampingi langsung oleh tutor. Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi yaitu faktor

cuaca yang tidak mendukung karena menyebabkan peserta malas untuk datang belajar.

2) SKB Inklusi

Hasil pelaksanaan SKB Inklusi yaitu berjalan satu semester. Dilaksanakan sejak bulan september 2021 hingga bulan Maret 2022. Tutor berjumlah 11 orang, enam diantaranya tutor kelas inklusi dan lima tutor mengajar di kelas reguler. Kegiatan dilaksanakan tiga hari dalam seminggu yaitu hari selasa, rabu, dan jum'at pada jam 07.30-11.00 tergantung tingkatan siswa.

SKB Inklusi menghasilkan manfaat yaitu siswa menjadi disiplin belajar. Tutor mengungkapkan bahwa siswa khususnya kelas inklusi dapat mengendalikan diri serta membentuk karakter yang bermoral. Hal tersebut ditandai dengan keadaan belajar yang tertib dan sopan baik kegiatan yang diisi oleh materi akademik maupun sesi *sharing* antar siswa.

Kelas inklusi difokuskan pada bidang agama dengan membaca asmaul husna dan doa-doa pendek. Kemudian pada hari jum'at terdapat olahraga dan untuk minggu berikutnya praktek seperti shalat dan adzan. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadikan siswa senang dan tidak bosan untuk belajar.

Faktor pendukung kegiatan SKB Inklusi yaitu prasarana dan sarana cukup

memadai sehingga siswa nyaman dan semangat dalam belajar. Faktor penghambat yaitu belum memiliki tutor serta kurikulum khusus dan baku sesuai kebutuhan ABK di kelas inklusi sehingga tutor masih mengacu pada kurikulum formal. Hal tersebut berimbas pada hasil belajar siswa yang menunjukkan perbedaan dengan kelas reguler. Perbedaan tersebut dijelaskan oleh tutor bahwa siswa kelas dua reguler sudah dapat membaca dengan lancar, namun pada siswa kelas dua inklusi masih ditahap pengenalan huruf-huruf. Faktor penghambat selanjutnya yaitu masih membutuhkan psikolog secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan dan melakukan pendampingan secara emosional untuk ABK di kelas inklusi.

b. Hasil Program Taruni PAUD

Program Taruni PAUD merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar mendaftarkan anak usia dini ke PAUD. Sosialisasi dilakukan oleh Bunda PAUD yaitu istri kepala pemerintah masing-masing wilayahnya sampai level kelurahan, serta melibatkan kemitraan di bidang pendidikan.

Pengorganisasian dalam program ini masih belum jelas dalam pembagian kerjanya serta adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2017, Disdikbud Kota Tegal secara tidak legalitas telah melakukan

sosialisasi serupa yaitu mengajak masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke PAUD.

Faktor pendukung program yaitu dengan melibatkan istri kepala pemerintah dan organisasi pendidikan di masyarakat, akan disegani oleh masyarakat. Faktor penghambat yaitu adanya pandemi yang membatasi ruang komunikasi, serta pembagian kerja yang belum jelas sehingga pelaksanaannya belum dilaksanakan secara berlanjut. Berikut tabel hasil pelaksanaan program pengentasan angka putus sekolah di Kota Tegal.

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Program Pengentasan Angka Putus Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Program	Hasil Pelaksanaan
ASELA DIJAKETI 1.Si Abang Belajar 2.SKB Inklusi	1.Motivasi belajar siswa meningkat ditandai dengan antusias belajar yang tinggi. 2.Siswa menjadi disiplin belajar ditandai dengan keadaan belajar yang tertib dan sopan
Taruni PAUD (Pendaftaran Anak Usia Dini)	Belum berjalan

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Sebagai Pelaksana Program

1. Peran dalam Perumusan Program

Peneliti menggunakan teori dari Biddle dan Thomas dalam Achmad dan Dewi (2018) yaitu mengkaji tentang peranan dalam dimensi kebijakan. Para aktor kebijakan akan memainkan perilaku yang sesuai dengan peran yang dimilikinya. Berikut penjelasan lebih lanjut:

- a. Perilaku yang muncul dalam interaksi perumusan program pengentasan angka putus sekolah

Peran aktor kebijakan dan program pada indikator perilaku yang muncul akibat adanya interaksi yaitu adanya perintah dan koordinasi. Perintah dan koordinasi oleh Disdikbud Kota Tegal merupakan sebuah perilaku yang wajar terjadi, karena adanya bentuk hierarkis dari pembentukan tim-tim setiap programnya. Perintah dan koordinasi tersebut berasal dari Disdikbud Kota Tegal kepada para pelaksana program di lapangan.

Disdikbud Kota Tegal selaku koordinator program memiliki kewajiban melakukan interaksi baik dengan antar pemerintah, swasta (UPS Kota Tegal), dan masyarakat (Para relawan pendidikan. Kaitannya interaksi dengan masyarakat, Disdikbud Kota Tegal menerima laporan program yang dilakukan oleh satuan pendidikan maupun sasaran program.

Laporan diterima apabila program telah dilaksanakan dan melakukan evaluasi.

b. Kedudukan Aktor Kebijakan

Kedudukan atau jabatan aktor kebijakan seringkali ditentukan oleh seberapa besar pemerintah ingin melibatkan unsur lain dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses perumusan program pengentasan angka putus sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tidak membatasi pihak lain yang ingin terlibat. Disdikbud Kota Tegal berperan sebagai aktor utama kebijakan, sedangkan pihak lain seperti swasta (UPS Tegal) dan masyarakat (para relawan pendidikan) merupakan aktor sekunder kebijakan. Keterlibatan mereka akan menunjang dan mensukseskan program.

Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan sinergi antar aktor untuk mendukung keberlanjutan program dan mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut juga akan berdampak pada masyarakat secara luas untuk lebih mengenal dan berpartisipasi dalam program.

c. Kaitan Kedudukan dengan Perilaku Aktor Kebijakan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sebagai lembaga pemerintahan di bidang pendidikan yang berkedudukan sebagai aktor utama dalam perumusan

program memiliki kewenangan dalam menentukan pihak swasta maupun masyarakat untuk melakukan kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat saling mengharapkan imbalan satu sama lain seperti properti, saran dan kritik, atau bentuk lainnya.

Program ASELA DIJAKETI memiliki sinergitas dengan melibatkan pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, para pemerhati dan peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kecamatan, kelurahan, RW dan RT serta keluarga sebagai lini terkecil dalam membentengi, membimbing dan mengarahkan generasi muda, putra putri daerah Kota Tegal agar semuanya mengenyam pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Hal tersebut dilakukan untuk berdaya saing dan berdaya guna demi kemajuan Kota Tegal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bekerjasama dengan beberapa lembaga besar. Untuk Si Abang Belajar antara lain dengan DISKOMINFO (Dinas Komunikasi dan Informatika), Bank Jateng, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pak camat dan pak lurah, psikolog, Selanjutnya Disdikbud melakukan kerjasama dalam SKB Inklusi antara lain dengan teraphys, ahli gizi, dan dokter kesehatan.

Program selanjutnya yaitu Taruni PAUD melibatkan lembaga-lembaga besar dalam pelaksanaannya. Mitra yang terlibat yaitu yaitu IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak), IGRA (Ikatan Guru Raudatul Afthal), HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini), BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) terkait perencanaan program, BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah) terkait dalam membahas anggaran program, dan DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait pendataan Anak Usia Dini di Kota Tegal.

2. Peran dalam Pengorganisasian Program
a. Program ASELA DIJAKETI

Pengorganisasian program ASELA DIJAKETI tertera pada Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 188.4/008 Tentang Pembentukan Tim Efektif ASELA DIJAKETI. Terdapat tiga tim antara lain Koordinator Tim Administrasi dan Dokumentasi, Jabatan yang terlibat antara lain dapat dilihat struktur berikut.



Gambar 1. Struktur Birokrasi Disdikbud Kota Tegal Program ASELA DIJAKETI

Pembiayaan pelaksanaan program ASELA DIJAKETI mengandalkan dari dana APBD Kota Tegal. APBD tersebut dikelola oleh BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah) Kota Tegal untuk pemenuhan fasilitas, transport, insentif pelaksana, dan lainnya.

b. Program Taruni PAUD

Program Taruni PAUD dilaksanakan oleh Tim Bunda PAUD. Berdasarkan SK Wali Kota Tegal Nomor 420/125, struktur Tim Bunda PAUD terdiri dari Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, semua pegawai bidang P2PNF, dan penilik PAUD.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Taruni PAUD bersumber penuh dari APBD Kota Tegal serta dana sah dan tidak mengikat. Pembiayaan digunakan untuk

pemenuhan sarana serta keperluan pembiayaan yang menunjang program.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Terdapat dua program dalam mengatasi angka putus sekolah di Kota Tegal. Program pertama yaitu ASELA DIJAKETI (Ayo Sekolah Lagi Yang Terintegrasi Pendidikan Dengan Pendidikan Kejar Paket dan SKB Inklusi) disertai pembentukan Sanggar Kegiatan Bangkit Belajar (Si Abang Belajar) dan Penetapan SKB Inklusi (Pelayanan Pendidikan Inklusi di jenjang Pendidikan Nonformal). Program kedua yaitu Taruni PAUD (Pendaftaran Anak Usia Dini ke PAUD).
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal memiliki peran dalam perumusan dan pengorganisasian program. Dalam perumusan program, Disdikbud memiliki kedudukan sebagai aktor utama yang memiliki kuasa dalam memilih partner baik dari antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pengorganisasian program, Disdikbud memiliki peran dalam memfasilitasi dan membiayai pelaksanaan program.

Saran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal melakukan seleksi ketat terhadap sumberdaya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan program. Sumber daya manusia dipilih berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program. Jumlah SDM dari segi kuantitas dalam pengimplementasian program sesuai apa yang dibutuhkan yaitu mampu melaksanakan tugas sesuai posisinya tanpa ada tumpang tindih.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal perlu menambahkan sarana sosialisasi terkait program pengentasan angka putus sekolah agar dikenal masyarakat luas. Media sosialisasi yang dapat dilakukan seperti pembuatan media sosial, papan pengumuman, dan radio.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. N. (2011). *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta: Sabda.
- Atmoko, A. T. (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Siswa Putus Sekolah Tingkat Menengah di Kabupaten Batang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Elwijaya, F., Mairina, V., Gistituati, N. (2018). *Konsep Dasar Kebijakan*

- Pendidikan. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6(1), 67–71.
- Irianto, Y. B. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Morin, Benjamin; Pati, A. S. F. (2017). Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Moses. (2012). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. *Media Riset Bisnis & Manajemen*, 12(1), 18–36.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan (dari Filosofi ke Implementasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M.A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Volume 11, Nomor 01
- Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2020* Tentang Pelaksanaan program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
- Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2021* Tentang Program Ayo Sekolah Lagi Melalui Pendidikan Formal dan Nonformal di Kota Tegal
- Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 421/114/2021* Tentang Sanggar Belajar “Si Abang Belajar” Kota Tegal
- Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 420/125* Tentang Pembentukan Tim
- Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Tegal
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 188.4/008* Tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan Melalui ASELA DIJAKETI di Kota Tegal